



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi Kebijakan Publik.

Implementasi kebijakan dipandang dalam pengertian yang luas merupakan tahap dari proses kebijakan segera setelah penetapan undang-undang. Implementasi dipandang secara luas mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan dalam upaya untuk meraih tujuan-tujuan kebijakan program. Implementasi pada sisi lain merupakan fenomena yang kompleks yang mungkin dapat dipahami sebagai suatu proses, suatu keluaran (*output*) maupun sebagai suatu dampak (*outcome*) (Budi Winarno, 2007: 144).

Berikut pendapat-pendapat ahli tentang konsep implementasi kebijakan publik: Ripley dan Franklin berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (*benefit*), atau suatu jenis keluaran yang nyata (*tangible output*). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah.

Sementara itu Grindle juga memberikan pandangan tentang implementasi dengan mengatakan bahwa secara umum, tugas implementasi adalah membentuk suatu kaitan (*linkage*) yang memudahkan tujuan-tujuan kebijakan bias direalisasikan sebagai dampak dari suatu kegiatan pemerintah.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Selanjutnya Van Meter dan Van Horn membatasi implementasi kebijakan sebagai tindakan yang dilakukan oleh individu-individu atau kelompok-kelompok pemerintah maupun swasta yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam keputusan-keputusan kebijakan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan-perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan. Yang perlu ditekankan disini adalah bahwa tahap-tahap implementasi kebijakan tidak akan dimulai sebelum tujuan-tujuan dan saran-saran ditetapkan atau diidentifikasi oleh keputusan-keputusan kebijakan. Dengan demikian tahap implementasi terjadi hanya setelah undang-undang ditetapkan dan dana disediakan untuk membiayai implementasi kebijakan tersebut. (Budi Winarno,2007:146).

Menurut Daniel A. mazmanian dan Paul A. Sabatier (1979), yang dikutip Sholichin Abdul Wahab menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa *“memahami apa senyatanya terjadi sesudah sesuatu program dinyatakan berlaku atau dirumuskan merupakan fokus perhatian implementasi kebijakan, yakni kejadian-kejadian atau kegiatan-kegiatan yang timbul sesudah disahkan pedoman-pedoman kebijakan publik yang mencakup baik usaha-usaha untuk mengadminstrasikannya maupun untuk menimbulkan akibat/dampak nyata pada masyarakat atau kejadian-kejadian”*. (Sholichin Abdul Wahab,2012:135).

Menurut Charles O. Jones (dalam Sri Maryuni,2016:7) implementasi adalah penerapan dapat dipandang sebagai sebuah proses interaksi antara suatu perangkat tujuan dan tindakan yang mampu untuk meraihnya. Penerapan adalah kemampuan untuk membentuk-hubungan lebih lanjut dalam rangkaian sebab akibat yang menghubungkan tindakan dan tujuan. Dalam pandangan Charles O. Jones ada tiga pilar penilaian terhadap implementasi kebijakan, yaitu:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- a. Organisasi, setiap organisasi harus memiliki struktur organisasi, adanya sumber daya manusia yang berkualitas sebagai tenaga pelaksana dan perlengkapan atau alat-alat kerja serta didukung dengan perangkat hukum yang jelas.
- b. Interpretasi, mereka yang melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan atau ketentuan yang berlaku, harus dilihat apakah pelaksanaannya telah sesuai dengan petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
- c. Penerapan, peraturan atau kebijakan yang berupa petunjuk pelaksana dan petunjuk teknis telah berjalan sesuai dengan ketentuan, untuk dapat melihat itu harus pula dilengkapi dengan adanya prosedur kerja yang jelas, program kerja serta jadwal kegiatan.

Dari beberapa definisi implementasi dapat disimpulkan bahwa implementasi diartikan sebagai proses pelaksanaan dari kebijakan yang telah dirumuskan sebelumnya dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Perlu pula ditambahkan bahwa proses implementasi untuk sebagian besar dipengaruhi oleh macam tujuan-tujuan yang ingin dicapai dan oleh cara tujuan-tujuan itu dirumuskan.

Implementasi menurut ahli-ahli di atas merupakan pelaksanaan kebijakan dasar berbentuk undang-undang dapat juga berbentuk perintah atau keputusan-keputusan yang penting atau seperti keputusan badan peradilan. Proses implementasi ini berlangsung setelah melalui sejumlah tahapan tertentu seperti tahapan pengesahan undang-undang kemudian output kebijakan dalam bentuk



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pelaksanaan keputusan dan seterusnya sampai perbaikan kebijakan yang bersangkutan.

2.2.1 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Implementasi Kebijakan

Keberhasilan implementasi kebijakan akan ditentukan oleh banyak indikator atau faktor, dan masing-masing variabel tersebut berhubungan satu sama lain. Menurut George C. Edwards dalam buku Budi Winarno indikator atau faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi kebijakan tersebut adalah:

a. Komunikasi

Komunikasi adalah dalam hal bagaimana kebijakan dikomunikasikan kepada publik untuk memperoleh respons dari pihak-pihak yang terlibat. Implementasi kebijakan dapat berjalan secara efektif maka yang harus bertanggung jawab terhadap implementasi sebuah kebijakan harus mengetahui apa yang harus dilakukannya. Perintah untuk mengimplementasikan kebijakan harus disampaikan secara jelas, akurat, dan konsisten kepada orang-orang yang mampu.

Keberhasilan implementasi kebijakan masyarakat agar implementor mengetahui apa yang harus dilakukan. Apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan harus ditransmisikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Secara umum Edwards membahas tiga hal penting dalam proses komunikasi kebijakan yakni:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Transmisi

Penyaluran komunikasi yang baik akan dapat menghasilkan suatu implementasi kebijakan yang baik pula. Sering kali terjadi masalah dalam penyaluran komunikasi yaitu adanya salah pengertian yang disebabkan banyaknya tingkatan birokrasi yang harus dilalui dalam proses komunikasi. Oleh karena itu seorang implementor harus mampu memahami makna dari suatu kebijakan, agar pada saat menyampaikan isi kebijakan kepada pihak lain dapat dipahami sebagai makna sebenarnya dan kebijakan dapat terimplementasi dengan baik.

2. Kejelasan

Kejelasan disini maksudnya adalah bagaimana komunikasi yang diterima oleh pelaksana kebijakan harus jelas dan tidak membingungkan atau tidak ambigu. Jika kebijakan-kebijakan diimplementasikan sebagaimana yang diinginkan maka petunjuk-petunjuk pelaksana tidak hanya diterima oleh para pelaksana kebijakan, tetapi komunikasi tersebut harus jelas.

3. Konsistensi

Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu komunikasi harus konsisten dan jelas untuk ditetapkan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

atau dijalankan. Walaupun perintah-perintah yang disampaikan kepada pelaksana kebijakan mempunyai unsur kejelasan, tetapi bila perintah-perintah tersebut bertentangan maka perintah tersebut tidak akan memudahkan para pelaksana kebijakan menjalankan tugasnya dengan baik.

b. Sumber daya

Faktor sumber daya mempunyai peranan penting dalam implementasi kebijakan, karena bagaimanapun jelas dan konsistennya ketentuan-ketentuan atau aturan-aturan suatu kebijakan jika para personil yang bertanggung jawab mengimplementasikan kebijakan kurang mempunyai sumber-sumber untuk melakukan pekerjaan secara efektif, maka implementasi kebijakan tersebut tidak akan bisa efektif. Dengan demikian sumber-sumber dapat merupakan faktor yang penting dalam melaksanakan kebijakan publik.

Walaupun isi kebijakan sudah dikomunikasikan secara jelas dan konsisten, tetapi apabila implementor kekurangan sumber daya untuk melaksanakan, implementasi tidak akan berjalan efektif. Sumber daya dapat berwujud, sumber daya manusia dan sumber daya finansial serta sumber daya pendukung adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar berjalan efektif.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Sumber Daya Manusia/Staf

Barangkali sumber daya yang paling penting dalam melaksanakan tugas kebijakan adalah staf. Ada satu hal yang harus diingat bahwa jumlah tidak selalu mempunyai efek positif bagi implementasi kebijakan. Hal ini berarti bahwa jumlah staf yang banyak tidak secara otomatis mendorong implementasi yang berhasil. Namun disisi lain, kekurangan staf kekurangan staf juga akan menimbulkan persoalan yang pelik menyangkut implementasi kebijakan yang efektif. Sumber daya manusia yakni staf yang memadai serta keahlian-keahlian yang baik untuk melaksanakan tugas-tugas mereka, dan memiliki kompetensi implementor.

2. Informasi

Informasi merupakan sumber penting yang kedua dalam implementasi kebijakan. Dengan demikian, para pelaksana kebijakan harus diberi petunjuk untuk melaksanakan kebijakan.

3. Wewenang dan fasilitas.

Sumber lain yang penting dalam pelaksanaan adalah wewenang dan fasilitas atau sarana prasarana. Ketika wewenang tidak ada dan digunakan maka kekuatan

implementor dimata publik tidak dilegitimasi, sehingga dapat menggagalkan implementasi kebijakan public.

Fasilitas fisik atau non fisik dalam bentuk sarana dan prasarana bisa pula merupakan sumber-sumber penting dalam implementasi. Seorang pelaksana atau staf menginginkan fasilitas yang memadai. Dengan hal itu staf memahami apa yang harus dilakukan, dan wewenang yang dimiliki dapat digunakan untuk melakukan koordinasi, melengkapi perlengkapan, maka besar kemungkinan implementasi yang direncanakan akan berhasil.

c. Disposisi (sikap pelaksana)

Disposisi para pelaksana kebijakan merupakan faktor ketiga yang mempunyai konsekuensi-konsekuensi penting bagi implementasi kebijakan yang efektif. Disposisi adalah dalam hal kesediaan aktor untuk melakukan implementasi kebijakan, disposisi adalah tentang karakteristik atau watak yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran, ketaatan pada aturan, sifat demokratis. Apabila implementor memiliki disposisi yang baik, maka dia akan dapat menjalankan kebijakan dengan baik seperti yang diinginkan oleh pembuat kebijakan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Pengangkatan birokrat

Kecendrungan-kecendrungan pelaksana menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan. Hanya yang menjadi persoalan adalah bila personil yang tidak ada melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi, dan mereka harus digantikan oleh personil yang berdedikasi tinggi.

2. Insentif

Mengubah personil atau pelaksana pemerintah merupakan pekerjaan yang sangat sulit dan tidak menjamin proses implementasi kebijakan berjalan lancar. Untuk mengatasi masalah tersebut adalah memberikan insentif atau uang tambahan, hal ini mampu menjadi faktor pendorong yang membuat para pelaksana menjalankan perintah dengan baik.

d. Struktur birokrasi

Birokrasi merupakan salah satu institusi paling sering bahkan secara keseluruhan menjadi pelaksana kegiatan kebijakan. Implementasi kebijakan yang bersifat kompleks harus dijalankan secara kondusif agar pelaksanaan kebijakan dapat berjalan efektif. Berdasarkan penjelasan diatas, maka memahami stuktur birokrasi merupakan faktor yang fundamental untuk mengkaji implementasi kebijakan. Yang menjadi karakteristik disini adalah:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. *Standard Operating Prosedur*

SOP yang merupakan tuntutan internal akan kepastian waktu dari sumber daya dalam organisasi kerja yang kompleks. Ini adalah dilihat dari struktural yang paling dasar dari organisasi adalah prosedur-prosedur kerja. Dengan menggunakan SOP para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia dengan baik dan implementasi dapat berjalan dengan baik pula.

2. Fragmentasi atau tanggung jawab

Sifat kedua dari struktur birokrasi yang berpengaruh dalam pelaksanaan kebijakan adalah fragmentasi organisasi. Tanggung jawab bagi suatu kebijakan sering dijadikan sebagai usaha-usaha yang memungkinkan mereka mengkoordinasikan kebijakan-kebijakan yang telah direncanakan demi keberhasilan pelaksana implementasi kebijakan. Tanggung jawab bagi suatu bidang kebijakan sering tersebar diantara beberapa organisasi, seringkali pula terjadi desentralisasi kekuasaan tersebut dilakukan secara radikal guna mencapai tujuan-tujuan kebijakan.

Keberhasilan implementasi kebijakan mensyaratkan agar implementor memahami apa yang harus dilakukan. Setiap tujuan dan sasaran kebijakan harus disosialisasikan kepada kelompok sasaran sehingga akan mengurangi distorsi implementasi. Di sisi lain keberhasilan implementasi harus didukung oleh sumber



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya yang berupa sumber daya manusia yang memiliki kompetensi implementor dan sumber daya finansial. Selain hal tersebut keberhasilan implementasi kebijakan harus didukung oleh struktur birokrasi yang baik. Salah satu aspek struktur yang penting dari setiap organisasi adalah adanya prosedur operasi yang standar. Standar inilah yang menjadi pedoman bagi setiap implementor dalam bertindak. (Arifin Tahir,2014:62).

Ripley dan Franklin (dalam Wayne Parsons,2005:482) mengatakan bahwa keberhasilan implementasi relatif tidak sulit apabila kebijakannya bersifat distributif, kebijakan regulatifnya moderat, dan kebijakan redistributifnya rendah. Berbagai area kebijakan punya pola hubungan yang berbeda-beda, yang berarti bahwa dalam area redistributif terdapat lebih banyak tawar-menawar dan *politicking* ketimbang di area distributif, dimana mungkin ada tekanan kontrol yang besar.

Menurut Warnham (dalam Arifin Tahir,2014:60) ada beberapa faktor yang dapat menghambat dalam implementasi:

- a. Tidak tersedia sumber daya pada saat dibutuhkan
- b. Kurangnya informasi
- c. Tujuan-tujuan dari unit organisasi sering bertentangan sehingga membutuhkan waktu yang lama bagi manajemen untuk menyesuaikannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dunn (dalam Faried Ali & Andi Syamsu Alam, 2012:13) mengemukakan satu definisi yang merumuskan kebijakan publik adalah “hubungan dari unit pemerintahan dengan lingkungannya.”

Selanjutnya menurut J. Anderson (Budi Winarto, 2007:18) menyatakan bahwa kebijakan merupakan arah tindakan yang mempunyai maksud yang ditetapkan oleh seorang aktor atau sejumlah aktor dalam mengatasi suatu masalah atau suatu persoalan. Menurut Anderson, konsep atau pengertian kebijakan publik ini mempunyai beberapa implikasi, yakni:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Kebijakan merupakan arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat-pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan-keputusan tersendiri.
- c. Kebijakan adalah apa yang sebenarnya dilakukan oleh pemerintah dalam mengatur perdagangan, mengendalikan inflasi, atau mempromosikan perumahan rakyat dan bukan apa yang diinginkan oleh pemerintah.
- d. Kebijakan publik mungkin dalam membentuknya bersifat positif atau negatif. Secara positif, kebijakan mungkin mencakup bentuk tindakan pemerintah yang jelas untuk mempengaruhi suatu masalah tertentu. Secara negatif, kebijakan mungkin mencakup suatu keputusan oleh pejabat-pejabat pemerintah, tetapi tidak untuk mengambil tindakan dan tidak untuk melakukan sesuatu mengenai suatu persoalan yang memerlukan keterlibatan pemerintah.

Untuk memahami berbagai definisi kebijakan publik, kita dapat memahami beberapa konsep kunci yang termuat dalam kebijakan publik:

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politis dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan kongkrit yang berkembang di masyarakat.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun kebijakan publik juga bias dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.
- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan. Keputusan yang telah dirumuskan dalam kebijakan publik bisa dibuat oleh sebuah badan pemerintah, maupun oleh beberapa perwakilan lembaga pemerintah. (Edi Suharto,Phd,2005:44).

Berdasarkan uraian pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan kebijakan publik dalam penelitian ini adalah: serangkaian tindakan yang dilakukan oleh negara yang mempunyai tujuan tertentu. diikuti dan dilaksanakan oleh negara dalam rangka memecahkan masalah tertentu. Program keluarga harapan berdasarkan penjelasan tersebut, merupakan kebijakan publik dalam rangka program pengentasan kemiskinan di Indonesia.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Kebijakan publik membahas soal bagaimana isu-isu dan persoalan-persoalan tersebut disusun dan didefenisikan, dan bagaimana kesemuanya itu diletakkan dalam agenda kebijakan dan agenda politik. Selain itu, kebijakan publik juga merupakan studi tentang “bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif dan pasif pemerintah” (Heidenheimer dalam Wayne Parsons, 2005:14).

2.2.1 Tujuan Kebijakan

Kebijakan sosial merupakan suatu perangkat, mekanisme, dan sistem yang dapat mengarahkan dan menerjemahkan tujuan-tujuan pembangunan. Ada beberapa tujuan dari kebijakan publik secara lebih rinci tujuan-tujuan kebijakan sosial adalah :

- a. Mengantisipasi, mengurangi, atau mengatasi masalah-masalah sosial yang terjadi di masyarakat.
- b. Memenuhi kebutuhan-kebutuhan individu, kelompok, atau masyarakat yang tidak dapat mereka penuhi secara individual melainkan harus melakukan tindakan kolektif.
- c. Meningkatkan hubungan intrasosial manusia dengan mengurangi kedisfungsian sosial individu atau kelompok yang disebabkan oleh faktor-faktor internal-personal maupun eksternal-struktural.
- d. Meningkatkan situasi lingkungan sosial ekonomi yang kondusif bagi upaya pelaksanaan peranan-peranan sosial dan mencapai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

kebutuhan masyarakat sesuai dengan hak, harkat, dan martabat kemanusiaan.

- e. Menggali, mengalokasikan dan mengembangkan sumber-sumber kemasyarakatan demi tercapai kesejahteraan sosial dan keadilan sosial. (Edi Suharto, Phd, 2005:62)

2.2.2 Tahap-tahap Kebijakan Publik

Tahap-tahap kebijakan publik oleh (Budi Winarno, 2007:32) adalah sebagai berikut:

- a. Tahap penyusunan agenda

Pada tahap ini para pejabat yang dipilih dan diangkat menepatkan masalah pada agenda publik.

- b. Tahap formulasi kebijakan

Pada tahap ini masalah yang telah dimasukkan ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat keputusan.

- c. Tahap adopsi kebijakan

Pada tahap ini banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus, antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.

- d. Tahap implementasi kebijakan

Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

keputusan program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah ditingkat bawah.

e. Tahap evaluasi kebijakan

Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai dan di evaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Thomas R.Dye (Riant Nugroho,2014:113) mengembangkan model linier proses kebijakan dengan enam langkah yaitu:

1. Mengidentifikasi masalah kebijakan.
2. Mengembangkan model penetapan agenda untuk perkembangan kebijakan.
3. Melaksanakan proses perumusan kebijakan.
4. Menemukan dasar hukum bagi kebijakan dengan legitimasi kebijakan.
5. Implementasi kebijakan.
6. Evaluasi kebijakan pada implementasi dan kinerja kebijakan.



Gambar 2.1: Model linier proses kebijakan publik menurut Thomas R.Dye.

2.3 Bantuan Sosial

Bantuan sosial menurut Permendagri no 32 tahun 2011 adalah pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemda kepada individu, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.

Ketentuan umum pemberian bantuan sosial menurut Permendagri no 32 tahun 2011, pemda dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah. Anggota/masyarakat yang dimaksud meliputi:

- a. Individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum.
- b. Lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

Pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit:

- a. Selektif
- b. Memenuhi persyaratan penerima bantuan; Kriteria persyaratan penerima bantuan meliputi:
 1. Memiliki identitas yang jelas; dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan.
3. Bersifat sementara dan tidak terus menerus, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan;
4. Sesuai tujuan penggunaan.

2.4 Kemiskinan

2.4.1. Pengertian Kemiskinan

Secara etimologis, "kemiskinan" berasal dari kata "miskin" yang artinya tidak berharta benda dan serba kekurangan. Departemen Sosial dan Badan Pusat Statistik mendefinisikan kemiskinan dari perspektif kebutuhan dasar. Kemiskinan didefinisikan sebagai ketidakmampuan individu dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Lebih jauh disebutkan kemiskinan merupakan sebuah kondisi yang berada dibawah garis nilai standar kebutuhan minimum, baik untuk makanan dan non makanan yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*) atau kemiskinan (*poverty threshold*).

Kemiskinan menurut Suparlan (Desi Anggraini, 2014:18) bahwa kemiskinan adalah suatu standar tingkat hidup yang rendah yaitu adanya suatu tingkat kekurangan materi pada sejumlah atau segolongan orang dibandingkan dengan standar kehidupan yang umum berlaku dalam masyarakat bersangkutan. Standar kehidupan yang rendah ini secara langsung tampak pengaruhnya terhadap kesehatan, kehidupan moral dan rasa harga diri dari mereka yang tergolong sebagai orang miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kemiskinan juga dapat dibedakan menjadi tiga pengertian, yaitu kemiskinan absolut, relative, dan kultural. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila pendapatannya berada dibawah garis kemiskinan. Mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan hidup minimum, seperti pangan, sandang, kesehatan, papan, dan pendidikan. Seseorang yang tergolong miskin relatif sebenarnya telah hidup di atas garis kemiskinan, tetapi masih berada di bawah kemampuan masyarakat sekitarnya. Kemiskinan kultural berkaitan erat dengan sikap seseorang atau sekelompok masyarakat yang tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupan sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya.

2.4.2 . Dimensi Kemiskinan

Menurut Suharto (dalam Slamet Riyadi,2016:21) kemiskinan terbagi dalam beberapa dimensi yaitu:

- a. Dimensi ekonomi, kemiskinan didefinisikan sebagai kekurangan sumberdaya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup dan meningkatkan kesejahteraan sekelompok orang. Standar kemiskinan dalam dimensi ini diukur dengan standar baku yang dikenal dengan garis kemiskinan (*poverty line*),
- b. Dimensi politik, kemiskinan dapat dilihat dari tingkat akses terhadap kekuasaan (*power*).
- c. Dimensi sosial-psikologis, kemiskinan yang menunjuk pada kekurangan jaringan dan struktur sosial yang mendukung dalam mendapatkan kesempatan-kesempatan peningkatan produktifitas.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

selanjutnya Suharto (dalam Slamet Riyadi,2016:22) menyatakan bahwa kemiskinan dapat dikategorikan dalam empat kategori yaitu :

a. Kemiskinan Absolut

yaitu keadaan miskin yang diakibatkan oleh ketidakmampuan seseorang atau sekelompok orang dalam memenuhi kebutuhan pokoknya seperti kebutuhan untuk makan, pakaian, pendidikan, kesehatan, transportasi dan lain-lain. Penentuan kemiskinan absolut ini diukur melalui batas kemiskinan atau garis kemiskinan (*poverty line*) baik yang berupa indikator tunggal maupun komposit, seperti nutrisi, kalori, beras, pendapatan, pengeluaran, kebutuhan dasar, atau kombinasi beberapa indikator. Untuk mempermudah pengukuran biasanya dikonversikan dalam bentuk uang (pendapatan atau pengeluaran). Sehingga seseorang atau kelompok yang kemampuan ekonominya dibawah garis kemiskinan, dapat dikategorikan sebagai miskin secara absolut.

b. Kemiskinan Relatif

kemiskinan yang dialami individu atau kelompok dibandingkan dengan kondisi umum suatu masyarakat. Jika batas kemiskinan misalnya Rp.100.000 per kapita setiap bulan, maka seseorang yang memiliki pendapatan Rp.125.000 per bulan secara absolut dikategorikan tidak miskin, tetapi jika pendapatan rata-rata masyarakat setempat adalah Rp.200.000 per bulan, maka secara relatif orang tersebut termasuk dalam kategori miskin.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c. Kemiskinan Kultural

kemiskinan yang mengacu pada sikap, gaya hidup, nilai, orientasi sosial budaya seseorang atau masyarakat yang tidak sejalan dengan etos kemajuan masyarakat modern. Sikap malas, tidak memiliki kebutuhan berprestasi (*needs of achievement*), fatalis, berorientasi kemasa lalu, tidak memiliki jiwa wirausaha merupakan ciri dari kemiskinan dalam kategori kultural.

d. Kemiskinan Struktural

kemiskinan yang diakibatkan oleh ketidakadilan struktur, baik struktur politik, sosial, maupun ekonomi yang tidak memungkinkan seseorang atau sekelompok orang menjangkau sumber-sumber kehidupan yang sebenarnya tersedia bagi mereka. Adanya praktik monopoli dan oligopoli, dalam bidang ekonomi, akan menghasilkan mata rantai pemiskinan yang sulit dipecahkan. Sekuat apapun motivasi dan kerja keras seseorang, dalam kondisi struktur yang demikian tidak akan mampu melepaskan diri dari belenggu kemiskinannya. Karena aset dan akses terhadap sumber-sumber telah dikuasai oleh segolongan orang tertentu.

2.4.3. Variabel Kemiskinan

Wrihatnolo (dalam Slamet Riyadi, 2016:23) menyatakan bahwa terdapat dua unit analisis untuk pendataan rumah tangga miskin, yaitu unit wilayah dalam bentuk Satuan Lingkungan Setempat (SLS) berupa Rukun Tetangga atau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sejenisnya, serta unit rumah tangga yang ditentukan berdasarkan variabel 14 variabel inti berikut ini :

- a. Luas lantai per anggota rumah tangga/keluarga kurang dari 8 meter persegi,
- b. Jenis lantai rumah berupa tanah/papan dengan kualitas rendah,
- c. Jenis dinding rumah berupa bamboo atau papan dengan kualitas rendah,
- d. Fasilitas buang air besar belum ada,
- e. Sumber air minum bukan air bersih,
- f. Penerangan yang digunakan bukan listrik,
- g. Bahan bakar yang digunakan kayu/arang,
- h. Frekuensi makan dalam sehari kurang dari 2 kali,
- i. Tidak memiliki kemampuan membeli daging/susu/ayam dalam seminggu,
- j. Tidak memiliki kemampuan membeli baju baru setiap anggota rumah tangga,
- k. Tidak memiliki kemampuan berobat dipuskesmas/poliklinik,
- l. Lapangan pekerjaan berupa petani gurem, nelayan atau pekebun,
- m. Pendidikan kepala rumah tangga tidak tamat SD atau belum sekolah,
- n. Tidak memiliki asset/barang berharga minimal Rp.500.000.

Sulistiyani menyatakan bahwa terdapat berbagai variabel dalam menentukan tingkat kemiskinan. Misalnya BPS dengan indikator kebutuhan kalori

2.5 Tinjauan tentang Program Keluarga Harapan (PKH)

PKH adalah: Suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan tunai bersyarat kepada Rumah Tangga Sangat Miskin/Keluarga Sangat Miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH. PKH sebagai upaya untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan aspek kesehatan, pendidikan, kesejahteraan sosial. (dalam jurnal Khodziah Isnaini Kholif,hal 709-711. <https://www.dropbox.com>).

Tujuan umum PKH adalah: Untuk mengurangi angka kemiskinan dan memutus mata rantai kemiskinan, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, serta merubah perilaku RTSM/KSM yang relatif kurang mendukung peningkatan kesejahteraan, terutama pada kelompok RTSM/KSM. Tujuan tersebut sekaligus sebagai upaya mempercepat pencapaian target *Millinnium Development Goals* (MDGs). (Pedoman Umum PKH,2016:14).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan khusus PKH meliputi empat hal yaitu:

- a. Meningkatkan status sosial ekonomi RTSM,
- b. Meningkatkan taraf pendidikan anak RTSM,
- c. Meningkatkan status kesehatan dan gizi ibu hamil, ibu nifas, dan anak balita dan anak usia 5 – 7 tahun yang belum masuk sekolah dasar,
- d. Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan pendidikan dan kesehatan, khususnya bagi anak-anak RTSM.

2.5.3 Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH)

Pelaksanaan PKH meliputi :

A. Pelaksana PKH di Tingkat Pusat

Pelaksana program keluarga harapan adalah Direktorat Jaminan Sosial Keluarga, Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial Republik Indonesia.

Personil pelaksana PKH di pusat terdiri atas Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Direktorat Jaminan Sosial dan pegawai non PNS dengan ikatan perjanjian kerja dengan waktu tertentu (IPKWT) yang terdiri atas tenaga Ahli dan tenaga operator. Tenaga ahli dalam Direktorat Jaminan Sosial Keluarga bertugas membantu direktur dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian serta evaluasi PKH agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan program.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Pelaksana PKH di Tingkat Daerah

Pelaksana PKH di Tingkat Daerah adalah Dinas/Instansi Sosial yang membidangi urusan perlindungan dan jaminan sosial. Personil pelaksana PKH di daerah terdiri atas PNS di dinas/instansi sosial dan tenaga pelaksana dengan ikatan perjanjian kerja dengan waktu tertentu (IPKWP) yang terdiri atas koordinator wilayah provinsi, supervisor kabupaten/kota, pendamping dan operator.

Kelembagaan PKH terdiri dari: (a). tim koordinasi teknis ditingkat provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan. (b) pelaksana program keluarga harapan di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan.

(a). Tim koordinasi Teknis PKH Daerah

(i). Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi

Tujuan pembentukan untuk memantau semua kegiatan PKH di wilayah provinsi serta untuk memastikan komitmen daerah terkait dengan PKH.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi terdiri atas:

1. Gubernur sebagai pembina
2. Sekretaris daerah provinsi selaku ketua tim pengarah
3. Kepala Bappeda provinsi selaku ketua tim koordinasi teknis
4. Kepala dinas/instansi sosial selaku sekretaris

Anggota Tim Koordinasi Teknis PKH Provinsi:

1. Kepala dinas/instansi pendidikan
2. Kepala dinas/instansi kesehatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Kepala BPS provinsi
4. Kepala kantor wilayah kementerian agama
5. Kepala dinas/instansi komunikasi dan informatika
6. Kepala dinas/instansi tenaga kerja
7. Kepala dinas/instansi kependudukan dan pencatatan sipil
8. Lembaga lain yang dianggap sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah.

(ii). Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota

Tujuannya untuk memastikan persiapan dan pemenuhan tanggung jawab Kabupaten/Kota terhadap pelaksanaan PKH. Tim koordinasi ini akan menjadi saluran utama informasi program ke berbagai pihak terkait pada Kabupaten/Kota agar semua pihak bisa merespon dalam waktu yang singkat jika diperlukan. Juga diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan PKH.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota terdiri atas:

1. Bupati selaku Pembina
2. Sekretaris daerah Kabupaten/Kota selaku ketua tim pengarah
3. Kepala Bappeda Kabupaten/Kota selaku ketua tim koordinasi teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Kepala dinas/instansi sosial selaku sekretaris

Anggota Tim Koordinasi Teknis PKH Kabupaten/Kota:

1. Kepala dinas/instansi pendidikan
2. Kepala dinas/instansi kesehatan
3. Kepala BPS Kabupaten/Kota
4. Kepala kantor wilayah kementerian agama
5. Kepala dinas/instansi komunikasi dan informatika
6. Kepala dinas/instansi tenaga kerja
7. Kepala dinas/instansi kependudukan dan pencatatan sipil

(iii). Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan

Tujuannya untuk memastikan persiapan pemenuhan tanggung jawab kecamatan terhadap pelaksanaa PKH. Tim koordinasi akan menjadi saluran utama informasi program keberbagai pihak terkait pada kecamatan agar semua pihak bisa merespon dalam waktu yang singkat jika diperlukan. Juga diperlukan untuk mendorong partisipasi pemberi pelayanan dan menyelesaikan masalah pengadaan fasilitas pelayanan kesehatan dan pendidikan yang terkait dengan PKH.

Susunan Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan:

1. Kepala Bappeda selaku Pembina
2. Kepala dinas sosial selaku ketua tim pengarah
3. Camat selaku ketua tim teknis

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. koordinator pendamping selaku sekretaris

Anggota Tim Koordinasi Teknis PKH Kecamatan:

1. Kepala UPT pendidikan SD/ sederajat dan SMP/ sederajat
2. Kepala UPT kesehatan
3. Pendamping PKH
4. Kepala desa/ lurah lokasi PKH

(b). Pelaksana PKH Daerah

Pelaksana PKH dibentuk di setiap Provinsi, Kabupaten/Kota dan Kecamatan dimana PKH dilaksanakan. Pelaksana PKH daerah merupakan kunci untuk menyukseskan pelaksanaan PKH dan akan menjadi saluran informasi terpenting antara pelaksana PKH daerah dengan pelaksana PKH pusat serta tim koordinasi pusat dan daerah.

(i). Pelaksana PKH Provinsi

Susunan keanggotaan pelaksana PKH provinsi berjumlah 8 orang berasal dari Dinas Sosial yang terdiri atas:

1. Kepala dinas sosial/institusi sosial selaku pengarah.
2. Kepala bidang perlindungan/jaminan sosial selaku ketua pelaksana PKH Provinsi.
3. Kepala seksi dinas sosial/institusi sosial selaku sekretaris pelaksana PKH Provinsi.
4. Staf dinas sosial berjumlah 5 orang yang bertanggung jawab pada bidang data keluarga miskin, sistem pengaduan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, penyaluran bantuan, verifikasi dan monitoring evaluasi selaku anggota.

5. Tenaga ahli yang bertanggung jawab untuk membantu tugas dan fungsi pelaksana PKH di tingkat Provinsi.
6. Supervisi yang bertanggung jawab untuk memantau jalannya proses PKH.

(ii). Pelaksana PKH Kabupaten/Kota

Struktur pelaksana PKH Kabupaten/Kota terdiri dari:

1. Pengarah : kepala dinas sosial/institusi sosial
2. Ketua : kepala bidang perlindungan/jaminan sosial
3. Sekretaris : kepala seksi bidang sosial
4. Koordinator kabupaten/kota
5. Pendamping dan operator

(iii). Pelaksana PKH Kecamatan

Pelaksana PKH Kecamatan dibentuk di setiap kecamatan yang terdapat peserta PKH. Pelaksana PKH Kecamatan merupakan ujung tombak PKH karena unit ini akan berhubungan langsung dengan peserta PKH. (<http://www.tnp2k.go.id>).

Untuk mencapai suksesnya PKH adanya peran serta dari berbagai pihak dapat menjadi penunjang dari keberhasilan PKH tersebut. Berbagai instansi pemerintah maupun lembaga di pusat maupun di daerah harus bekerjasama dalam pelaksanaan PKH sehingga diharapkan dapat menunjang keberhasilan PKH,

merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan, baik pelayanan kesehatan, pelayanan pendidikan, pelayanan kesejahteraan sosial, pendamping maupun petugas lainnya.

Dengan adanya keterlibatan berbagai pihak satu sama lain yang saling terkait dan saling mempengaruhi, maka perlu adanya bimbingan teknis agar masing-masing pihak mengetahui tugas dan tanggung jawabnya secara efektif. Pemahaman tugas dan tanggung jawabnya masing-masing merupakan cara yang terbaik untuk melakukan kerja sama sehingga tidak ada yang tumpang tindih dan tidak ada yang tertinggal. Para pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi secara maksimal sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing sehingga target fungsional PKH yaitu mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia terutama pada kelompok rumah tangga sangat miskin dapat terwujud.

2.5.4. Penerima PKH

Berdasarkan pedoman umum PKH, penerima PKH adalah Rumah Tangga Sangat Miskin (RTSM) atau Keluarga Sangat Miskin (KSM) yang memenuhi satu atau beberapa kriteria yaitu:

- a. Ibu hamil/ibu nifas/anak balita,
- b. Anak usia 5-7 tahun yang belum masuk pendidikan dasar (pra sekolah)
- c. Anak SD/MI (usia 7-12 tahun),
- d. Anak SLTP/ MTs (usia 12-15 tahun),
- e. Anak usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan wajib 12 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

f. Penyandang disabilitas berat dan lanjut usia 70 tahun.

2.5.5. Kewajiban Peserta PKH

a). Kewajiban bidang kesehatan

RTSM/KSM diwajibkan memenuhi persyaratan kesehatan yang ditetapkan dalam protokol pelayanan kesehatan. Ibu hamil melakukan pemeriksaan di fasilitas kesehatan sebanyak empat kali, mendapatkan suplemen tablet Fe, proses persalinan harus ditolong oleh tenaga kesehatan serta Ibu nifas harus melakukan pemeriksaan kesehatannya setidaknya tiga setelah melahirkan. Balita diwajibkan melakukan imunisasi dan kunjungan keposyandu setiap bulannya.

b. Kewajiban Pendidikan

Anak peserta PKH usia 7 – 15 tahun harus didaftarkan atau terdaftar pada satuan pendidikan baik SD/MI/SDLB/Salafiyah Ula/Paket A atau SMP/MTs/SMLB/ Salafiyah Wustha/Paket B termasuk SMP/MTs terbuka) dan mengikuti kehadiran dikelas minimal 85 % dari hari sekolah dalam sebulan selama tahun ajaran berlangsung.

2.5.6. Besaran Bantuan PKH

Besaran bantuan tunai PKH yang diterima oleh KSM bervariasi antara yang satu dengan yang lain, sesuai jumlah anggota keluarga yang terhitung menurut ketentuan penerimaan bantuan PKH, baik komponen pendidikan atau kesehatan.

Tabel 2.2 Skema Bantuan PKH per tahun

No	Indeks Bantuan	Bantuan per RTSM per Tahun
1	Bantuan Tetap	500.000
2	Bantuan bagi RTSM/KSM yang memiliki: a. Anak usia di bawah 6 tahun atau b. Ibu hamil/menyusui	1.000.000
3	c. Anak peserta pendidikan setara SD/MI	450.000
4	d. Anak peserta pendidikan setara SMP/MTs	750.000
5	e. Anak peserta pendidikan setara SMA/MA	1.000.000
6	Bantuan Lanjut Usia 70 Tahun ke Atas	2.000.000
7	Penyandang Disabilitas Berat	2.000.000

Sumber: Pedoman umum PKH

2.5.7. Dasar Pelaksanaan PKH

- Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan, No: 31/KEP/MENKO/- ESRA/IX/2007 tentang “Tim Pengendali Program Keluarga Harapan” tanggal 2 September 2007.
- Keputusan Menteri Sosial Republik Indonesia No. 02A/HUK/2008 tentang “Tim Pelaksana Program Keluarga Harapan (PKH) Tahun 2008” tanggal 08 Januari 2008.
- Keputusan Gubernur tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Provinsi/TKPKD”.
- Keputusan Bupati/Walikota tentang “Tim Koordinasi Teknis Program Keluarga Harapan (PKH) Kabupaten/Kota/TKPKD”.
- Surat Kesepakatan Bupati untuk Berpartisipasi dalam Program Keluarga Harapan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2.5.8. Dasar Hukum PKH

- a. Undang-undang nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- b. Undang-undang nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
- c. Undang-undang no 11 tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial.
- d. Peraturan Presiden nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- e. Inpres nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan poin lampiran ke tentang Penyempurnaan Pelaksanaan Program Keluarga Harapan.

2.5.9. Mekanisme Pelaksanaan dan Kegiatan Program Keluarga Harapan

Mekanisme pelaksanaan PKH meliputi:

A. Pemilihan Daerah dalam PKH

Pemilihan daerah merupakan salah satu mekanisme dan prosedur dalam PKH yang dilaksanakan sebelum PKH berjalan di tingkat pelaksanaan operasional. Kriteria pemilihan kabupaten/kota didasarkan pada:

- a. Tingginya angka kemiskinan
- b. Tingginya angka gizi buruk dan angka transisi dari SD/MI, ke SMP/MTS
- c. Dinas/Instansi Sosial Kabupaten/ Kota menyediakan infrastruktur terkait untuk mendukung pelaksanaan PKH Kabupaten/ Kota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Ketersediaan sarana dan prasarana (supply) baik pendidikan maupun kesehatan, serta
- e. Adanya komitmen daerah

B. Pemilihan Peserta PKH

Proses pemilihan peserta PKH dilakukan dengan beberapa tahap yaitu:

- a. Survei dilokasi program untuk mendapatkan data rumah tangga miskin
- b. Pemilihan RTSM dari semua rumah tangga yang disurvei sebagai calon peserta PKH.
- c. Calon peserta tandatangani komitmen sebagai peserta PKH untuk menjadi peserta PKH

Pemilihan peserta PKH dilakukan dengan melakukan survei di lokasi program untuk mendapatkan data rumah tangga miskin. Untuk tahun 2007 survei tersebut dilakukan oleh BPS dengan data dasar yang diambil data daftar penerima Subsidi Langsung Tunai (SLT) kategori sangat miskin dan miskin serta data pendukung lainnya. Dalam melakukan survei petugas terdiri atas unsur BPS dan pengawas.

Data yang telah disusun tersebut kemudian disaring kembali berdasarkan syarat kepesertaan PKH yaitu rumah tangga yang memiliki anak 0-15 tahun, ibu hamil atau anak 15-18 tahun yang belum selesai pendidikan wajib belajar. Hasil saringan tersebut kemudian menetapkan RTSM tersebut sebagai calon peserta PKH melalui sistem ranking.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kegiatan PKH merupakan tahapan pelaksanaan PKH yang meliputi berbagai kegiatan yang dilakukan oleh seluruh komponen PKH dari awal ditetapkan suatu lokasi PKH sampai dengan berakhirnya program PKH.

Kegiatan PKH meliputi sebagai berikut:

a. Penetapan Sasaran (*targeting*)

Penetapan sasaran dilakukan dalam rangka perluasan jangkauan penerima manfaat PKH. Sumber data penetapan sasaran berasal dari Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin sesuai Peraturan Menteri Sosial Nomor 10/HUK/2016 tanggal 3 Mei 2016 tentang Mekanisme Penggunaan Data Terpadu Program Penanganan Fakir Miskin. Data peserta PKH diperoleh dari BDT yang diolah berdasarkan ranking kemiskinan terendah (sekitar 11% dari keluarga miskin,)

1. penyiapan data dan penetapan sasaran.

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan penelusuran data KKS per kecamatan untuk dijadikan penetapan kuota calon penerima PKH yang akan divalidasi. Data yang dimaksud adalah data KKS yang memiliki kelengkapan komponen PKH berupa kepala keluarga dan anggota keluarga.

2. Penetapan data awal validasi.

Adapun alur penetapan adalah sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Direktorat Jaminan Sosial Keluarga mengirimkan data calon penerima PKH kepada daerah, dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- b. Pemerintah daerah, dinas/Instansi Sosial Kabupaten/Kota melakukan pemilihan data yang sudah dan belum menjadi peserta PKH.
- c. Dalam hal ini pemerintah daerah memiliki data baru diluar data yang dikirim oleh pusat, maka pemerintah daerah dapat mengusulkan data tersebut untuk dijadikan data awal validasi untuk kemudian dilakukan pemadanan dengan data BDT oleh Kementerian Sosial RI sesuai kuota.
- d. Hasil pemilihan data pada butir b dan usulan data pada butir c dikirimkan ke Direktorat Jaminan Sosial Keluarga sebagai data awal validasi PKH sesuai kuota yang telah ditetapkan oleh Kemensos disertai berita penetapan yang disahkan oleh pemerintah daerah Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota.
- e. Pengusulan data oleh pemerintah daerah akan dijadikan sebagai data awal pelaksanaan validasi tahun berjalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

- f. Peserta PKH ditetapkan dengan Surat Keterangan (SK) Direktur Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial, Kementerian Sosial RI tentang penetapan lokasi PKH.

b. Pertemuan Awal dan Validasi

Setelah penetapan sasaran peserta PKH, Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan validasi calon peserta PKH. Tahapan proses validasi ini antara lain:

1. Pengiriman data calon peserta PKH

Direktorat Jaminan Sosial Keluarga melakukan pengiriman data KM calon peserta PKH ke pelaksana PKH Kabupaten/Kota untuk keperluan validasi (pencocokan data). Data ini mencakup seluruh anggota KM yang berhak menerima bantuan program PKH di seluruh Kabupaten/Kota yang menjadi wilayah PKH.

2. Persiapan pertemuan awal

Setelah menerima data calon peserta PKH, pelaksana PKH Kabupaten/Kota melakukan koordinasi dengan pendamping dan operator untuk menetapkan pembagian jumlah calon peserta PKH berdasarkan wilayah kerja pendamping. Kemudian melakukan pencetakan formulir validasi dan Surat Undangan Pertemuan Awal (SUPA). SUPA yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

telah tercetak dikirimkan kepada calon peserta PKH sesuai nama dan alamat yang telah tercantum.

3. Pertemuan awal dan validasi

Sebelum pelaksanaan pertemuan awal, pendamping harus berkoordinasi dengan aparat Kecamatan dan Kelurahan/Desa setempat. Apabila terdapat KM yang menerima SUPA namun tidak hadir, maka pendamping berkewajiban mendatangi rumah KM tersebut setelah pertemuan awal dan menyampaikan hal-hal yang telah disampaikan dalam pertemuan awal tersebut.

c. Pembentukan Kelompok KSM

Setiap pendamping menetapkan dan melakukan pertemuan kelompok peserta PKH minimal dilaksanakan setiap bulan sekali. Setiap kelompok berjumlah antara 15-25 KPM dan menunjuk/menetapkan ketua kelompok, yang berfungsi sebagai contact person bagi pendamping untuk persiapan pelaksanaan kegiatan, seperti kegiatan sosialisasi, pelatihan, penyuluhan, penyelesaian masalah, sesi pemberdayaan keluarga (P2K2-FDS), dan sebagainya.

Ketua kelompok dipilih secara terbuka untuk menjaring kandidat yang secara suka rela memiliki komitmen tinggi (tanpa gaji atau honor) untuk mensukseskan pelaksanaan PKH.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

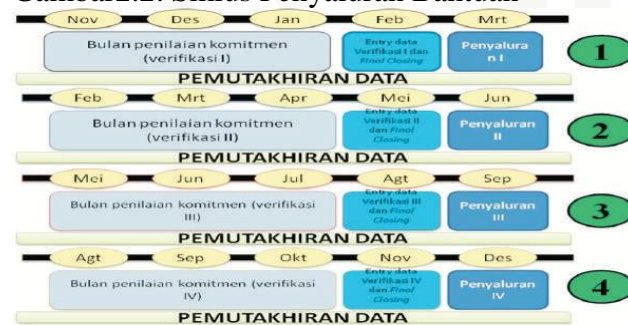
d. Penyaluran Bantuan

Bantuan PKH diberikan kepada peserta PKH. Penyaluran bantuan bagi peserta yang telah ditetapkan pada tahun anggaran sebelumnya dilaksanakan empat tahap dalam satu tahun, sedangkan untuk kepesertaan yang ditetapkan pada tahun berjalan, penyaluran dilaksanakan satu tahap.

Bantuan PKH disalurkan melalui Kantor Pos untuk penyaluran di Kantor Lembaga Bayar maupun di Komunitas serta disalurkan melalui Bank Umum Milik Negara.

Jadwal dan pelaksanaan penyaluran bantuan disesuaikan dengan situasi dan kondisi yang ada pada tahun berjalan serta disesuaikan dengan kebijakan yang dibuat untuk memperlancar pelaksanaan penyaluran bantuan.

Gambar2.2: Siklus Penyaluran Bantuan



Sumber: Pedoman Umum Pelaksanaan PKH

e. Verifikasi Komitmen

Verifikasi komitmen peserta PKH pada prinsipnya dilakukan terhadap pendaftaran dan kehadiran anak baik disekolah untuk komponen pendidikan maupun puskesmas dan jaringannya untuk komponen kesehatan. Kepada pihak pelaksana pelayanan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pendidikan, baik sekolah/ madrasah/ penyelenggara paket A/B/C sangat diharapkan peran aktifnya untuk menarik kembali anak-anak KM, khususnya yang belum menyelesaikan pendidikan dasar namun telah meninggalkan bangku sekolah atau bekerja, untuk kembali ke sekolah. Verifikasi anggota keluarga peserta PKH penyandang disabilitas hanya diberlakukan pemeriksaan satu kali dalam setahun.

Dalam pelaksanaan verifikasi perangkat keras dan perangkat lunak serta formulir-formulir yang membantu pelaksanaan verifikasi DMR juga dibutuhkan yaitu formulir verifikasi kesehatan dan formulir verifikasi pendidikan, selain dari pada kedua formulir tersebut telah dibuatkan formulir bantuan yang dapat digunakan untuk membantu pelaksana PKH dilapangan dalam melakukan verifikasi komitmen peserta PKH.

f. Pemutakhiran Data KSM

pemutakhiran data adalah perubahan sebagian atau seluruh data awal yang tercatat pada Master Database. Beberapa contoh perubahan informasi dari KM sebagai berikut:

1. Perubahan tempat tinggal,
2. Kelahiran anggota keluarga,
3. Penarikan anak-anak dari program (kematian, keluar/ pindah sekolah, dan sebagainya),
4. Masuknya anak-anak baru ke sekolah,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu hamil, dan lain sebagainya.

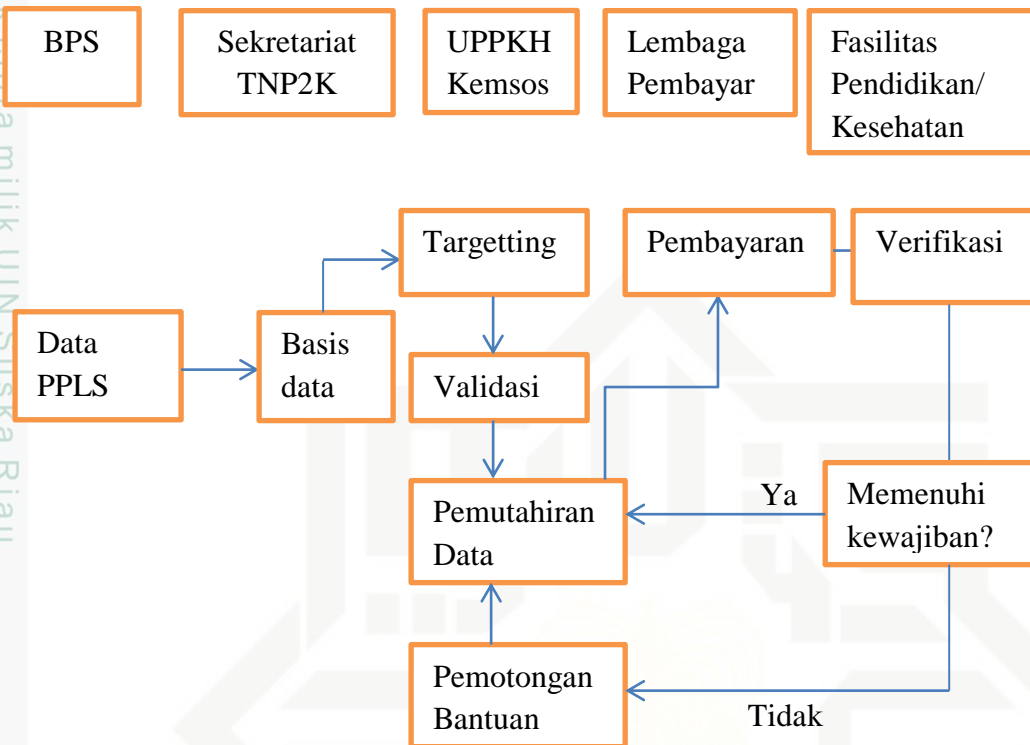
Pemutakhiran data dilakukan oleh pendamping PKH setiap ada perubahan. Pendamping PKH bekerjasama dengan ketua kelompok PKH untuk memeriksa perubahan data terkait.

Pemutakhiran data pertama adalah proses yang dilakukan setelah pelaksanaan validasi yaitu melengkapi dan mengumpulkan data yang diperlukan untuk kesempurnaan data hasil validasi, terutama data fasilitas kesehatan, pendidikan, data fasilitas kesejahteraan sosial dan komplementaritas program kesejahteraan sosial.

Untuk mendukung terlaksananya program bantuan sosial PKH ini, maka dilakukan kegiatan-kegiatan sebagai berikut;

1. Koordinasi dan Sosialisasi
2. Rekrutmen, dan Pelatihan
3. Rapat koordinasi tingkat pusat, propinsi, dan kabupaten/kota
4. Bimbingan teknis pendamping dan operator (reguler) serta penyedia layanan (*service provider*)
5. Pengaduan masyarakat
6. Monitoring dan evaluasi
7. Pertemuan Peningkatan Kemampuan Keluarga (P2K2)–*Family Development Sesion (FDS)*.

Gambar 2.3: Proses Utama Pelaksanaan PKH



Sumber: UPPKH Pusat

2.6 Penelitian Terdahulu.

Penelitian tentang bantuan sosial PKH ini sudah pernah dilakukan penelitian oleh peneliti terdahulu, namun penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian-penelitian terdahulu, baik tujuan, teknik pengumpulan data dan lain sebagainya. Berikut lebih jelasnya pada tabel dibawah ini:

No	Nama Peneliti	Tahun Penelitian	Judul Peneliti	Hasil Penelitian
1	Nurlizah	2014	Analisis Fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) dalam Meningkatkan Kesejahteraan Rumah Tangga Miskin di Desa Sipungguk Kecamatan Salo	Fungsi Program Keluarga Harapan (PKH) di Desa Sipungguk Kec. Salo dalam kategori kurang Maksimal (63,51%), dengan alasan kurangnya sosialisasi tentang PKH serta

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumpukan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

			Kampar.	kurangnya pengawasan pemerintah desa terhadap PKH di Desa Sipungguk harus lebih mengoptimalkan lagi sosialisasi dalam PKH sehingga fungsinya bisa terwujud dan meningkatkan kesejahteraan keluarga miskin.
2	Desi Anggraini	2014	Upaya Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Desa Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi	Upaya Pemerintah Desa dalam Mewujudkan Keluarga Sejahtera di Desa Kopah Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi masih dalam kategori kurang maksimal (54,49%), dengan alasan masih kurangnya sosialisasi yang dilakukan oleh pemerintah atau pendamping PKH kepada masyarakat.
3	Andrianto	2010	Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kesejahteraan PKH di Desa Sibarakun Kec. Benai Kab. Kuantan Singingi	Kurangnya ekonomi dan sumber daya alam (SDA) yang tidak mencukupi.

Adapun alasan penulis untuk melakukan penelitian tentang implementasi bantuan sosial PKH di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab.Kampar yaitu penelitian ini mempunyai permasalahan yang berbeda dengan penelitian terdahulu. Adapun permasalahan pokok dalam

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan bantuan sosial PKH di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar dan faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi pelaksanaan bantuan sosial PKH tersebut.

2.7 Pandangan Islam dan Kajian Islam tentang Pengentasan Kemiskinan.

Kata miskin didalam al-Quran biasa digandengkan dengan kata faqir. Karenanya dua istilah ini menjadi kajian khusus dalam melihat tolak ukur miskin didalam al-Quran. Didalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Miskin diartikan tidak berharta benda; serba kekurangan (berpenghasilan rendah), sementara Fakir mempunyai arti: Orang yang sangat berkekurangan; orang yang sangat miskin; orang yang dengan sengaja membuat dirinya menderita kekurangan untuk mencapai kesempurnaan batin.

Pada prinsipnya orang miskin dan orang faqir adalah mereka yang tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sebagai kebalikan dari orang kaya yaitu orang yang memiliki kelebihan harta seukuran satu nisab dari kebutuhan pokoknya dan anak-anaknya yang meliputi kebutuhan bidang sandang, pangan, papan, minuman, kendaraan, sarana untuk bekerja dan lain sebagainya. Faktor-faktor penyebab timbulnya kemiskinan dapat diidentifikasi dari 3 penggolongan kemiskinan yaitu kemiskinan kultural, kemiskinan struktural, dan kemiskinan natural.

Solusi al-Quran dalam upaya untuk pengentasan kemiskinan dapat dilihat dari tiga faktor yaitu faktor individu meliputi perintah untuk bekerja keras sebagaimana Allah berfirman dalam QS Al-jumuah:62:10

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Apabila telah ditunaikan sembahyang, maka bertebaranlah kamu di muka bumi, dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyaknya supaya kamu beruntung. (QS. Al-Jumuah (62):10)

Bahkan Al-Quran tidak memberi peluang bagi seseorang untuk menganggur sepanjang saat yang dialami dalam kehidupan dunia ini. Firman Allah SWT:

فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ

Maka apabila engkau telah selesai (dari suatu urusan) tetaplah bekerja keras untuk (urusan yang lain) (QS. Al-Insyirah; 94: 7).

Faktor selanjutnya yaitu faktor lingkungan sosial kemasyarakatan meliputi urgensi zakat produktif, prinsip membangun kerjasama dalam lingkungan kerabat dan masyarakat hal ini sebagaimana ditegaskan di dalam QS Al-isra';17;26:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تَبْذُرْ ثَبَدِيرًا

Dan berikanlah kepada keluarga dekat haknya, juga kepada orang miskin, dan orang yang berada dalam perjalanan...(QS Al-Isra' [17]: 26).

Faktor selanjutnya yaitu faktor pemerintah yakni membangun sistem ekonomi yang adil dalam masyarakat.

2.8 Kerangka Pemikiran.

Pemikiran awal yang melandasi penelitian ini adalah fakta masih tingginya angka kemiskinan di Indonesia dalam dekade terakhir, serta tingginya komitmen pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan di Indonesia melalui alokasi APBN yang terus meningkat setiap tahunnya. Namun faktanya, capaian pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan justru mengalami perlambatan setiap

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tahunnya. Hal tersebut tentunya tidak selaras dengan besarnya alokasi anggaran yang telah dialokasikan untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia.

PKH merupakan bagian dari program perlindungan sosial (*cluster I*) dalam rangka mempercepat pengentasan kemiskinan di Indonesia. PKH telah diimplementasikan sejak tahun 2007 secara Nasional pada 34 Provinsi di Indonesia. PKH merupakan varian program Bantuan Tunai Bersyarat (*Conditional Cast Transfer*) yaitu berupa pemberian sejumlah uang tunai yang diberikan kepada KSM penerima bantuan dalam periode tiga bulanan, selama enam tahun implementasi program. Sehingga diharapkan terjadi perubahan pada penerima PKH yang semula sangat miskin menjadi miskin, bahkan diharapkan dapat keluar dari garis kemiskinan.

Berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk mendapatkan gambaran komprehensif mengenai bagaimana implementasi bantuan sosial PKH di Desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab.Kampar. Penelitian ini mencoba untuk menggambarkan implementasi sebuah kebijakan publik yang dilakukan oleh implementator program keluarga harapan di desa Muara Jalai Kec. Kampar Utara Kab. Kampar.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

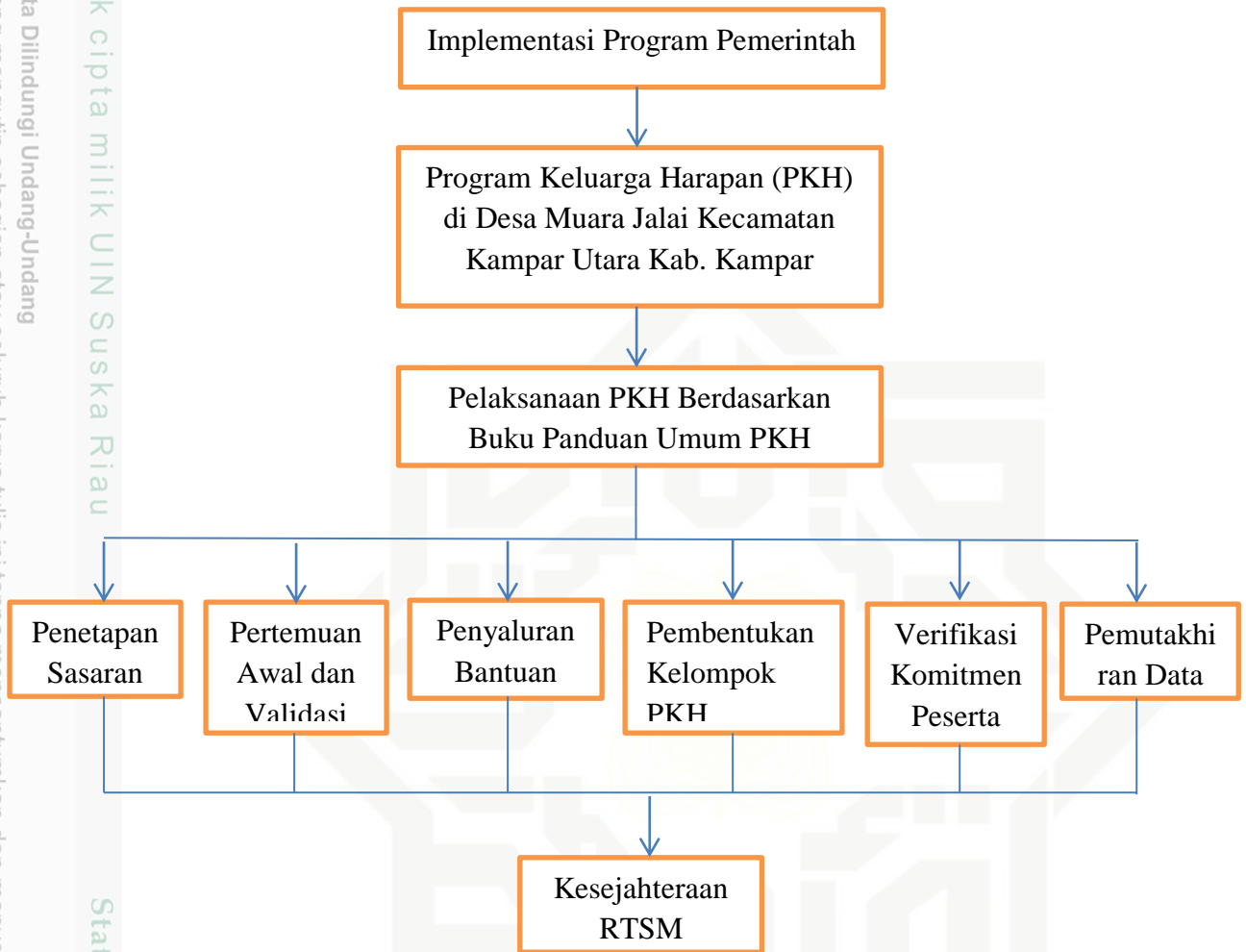
1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Gambar 2.4: Bagan Kerangka Pikir



2.9 Defenisi Konsep.

Adapun defenisi konsep dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- Implementasi kebijakan adalah suatu proses penerapan kegiatan atau program yang telah diputuskan oleh pemerintah demi mencapai tujuan yang ditetapkan dan dilaksanakan oleh sekumpulan orang yang disebut pegawai atau implementor kebijakan.
- Bantuan sosial menurut permendagri no32 tahun 2011 yaitu: pemberian bantuan berupa uang atau barang dari pemda kepada individu, keluarga,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelompok dan/atau masyarakat yang sipatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial.

- c. Program keluarga harapan (PKH) adalah suatu program penanggulangan kemiskinan yang memberikan bantuan uang tunai kepada rumah tangga sangat miskin/keluarga sangat miskin (RTSM/KSM) yang ditetapkan sebagai peserta PKH.

2.10 Indikator Penelitian.

Tabel 2.3 Indikator Penelitian

Variabel	Indikator	Sub Indikator
Buku Pedoman Umum Pelaksanaan PKH	1. Penetapan Sasaran	1. penyiapan data 2. Sumber Data 3. Penetapan Data Awal Validasi 4. Pemilihan Data (Verifikasi)
	2. Pertemuan Awal dan Validasi	1. Pengiriman Data Penerima PKH ke Wilayah PKH 2. Persiapan Pertemuan Awal 3. Pertemuan Awal
	3. Penyaluran Bantuan	1. Jadwal Penyaluran Bantuan 2. Tempat Penyaluran Bantuan 3. Jumlah Bantuan PKH yang di Terima
	4. Pembentukan Kelompok Peserta PKH	1. Pemilihan Ketua Kelompok 2. Tugas Ketua Kelompok 3. Kegiatan Kelompok Peserta PKH
	5. Verifikasi Komitmen Peserta PKH	1. Verifikasi pada Fasilitas Kesehatan 2. Verifikasi pada Fasilitas Pendidikan
	6. Pemutakhiran Data	1. Pelaksanaan Pemutakhiran Data 2. Pengimputan Data yang di Mutakhirkan

Sumber: Pedoman Umum Pelaksanaan PKH Tahun 2016